

Hasil Penelitian

DESKRIPSI PERMASALAHAN UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DANAU TOBA SUMATERA UTARA

(PROBLEM DESCRIPTION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT EFFORT ON TOBA LAKE NORTH SUMATERA)

Porman Juanda Marpomari Mahulae

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan
e-mail: pormanjuanda@gmail.com

Diterima: 29 Januari 2019; Direvisi: 15 Februari 2019; Disetujui: 22 Februari 2019

ABSTRAK

Penelitian ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengurai masalah yang dihadapi para stakeholder dalam mewujudkan sebuah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah indikator dasar dari 5 (lima) isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan diperkuat dengan data-data yang bersifat kuantitatif. Berdasarkan hasil pengukuran indikator-indikator dasar tersebut dan pendalaman yang dilakukan dengan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan para informan penelitian, diketahui bahwa sebenarnya penyelesaian persoalan dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi wisata masih menjadi tugas besar bagi para stakeholder kepariwisataan di kawasan tersebut. Berdasarkan jenis permasalahan yang ada, maka terdapat kebutuhan kebijakan pengembangan terkait: 1) meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata; 2) penjaminan kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal dengan adanya kegiatan pariwisata; 3) pemenuhan kepuasan pengunjung; 4) pelibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan; dan 5) penjaminan kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci: pengembangan, pariwisata berkelanjutan, Danau Toba

ABSTRACT

This research is an attempt to find out the problems that faced in realizing a sustainable tourism management in the Lake Toba area. The measured indicators in this study are the basic indicators of the 5 main issues of sustainable tourism development that was developed by United Nation World Tourism Organization (UNWTO). This research is descriptive research with qualitative approach and reinforced with quantitative data. Based on the result of measurement of the basic indicators and the deepening done with the discussions conducted with the informants of the research, it is known that the actual settlement of the basic problem of sustainable tourism development in a tourist destination is still a big task for tourism stakeholders in the region. Based on the types of problems that exist, there is a need for development policies that related to: 1) improving the economy with tourism activities; 2) guarantee of regional welfare and local communities in the presence of tourism activities; 3) fulfillment of visitor satisfaction; 4) involvement of local communities in tourism management; and 5) guarantee of environmental sustainability.

Keywords: development, sustainable tourism, Toba Lake

PENDAHULUAN

Sejarah kepariwisataan di kawasan Danau Toba merupakan sebuah bentuk kontra dari sebuah pengelolaan pariwisata yang

berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan kepariwisataan pada kawasan ini yang sempat jaya di masa lalu, namun berangsur-angsur menurun pada masa

selanjutnya (Sitorus et al, 2016). Lumbanraja (2012) mencatat bahwa masa kejayaan wisata di Danau Toba mengalami masa puncak pada tahun 1996 dengan kunjungan hampir empat juta wisatawan. Sejak masa itu hingga sekarang catatan tersebut tidak pernah terulang kembali. Bahkan Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Danau Toba pernah mencapai -30,94% pada tahun 2013 (Kementerian Pariwisata, 2016).

Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan adalah sebuah prinsip pembangunan kepariwisataan yang berpedoman pada konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) (Lu, J. & Nepal, S.K., 2009), yaitu sebuah konsep pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan pada saat ini dengan tidak mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Baker, S., 2006); (Elliott, J.A., 2006); dan (Rogers, P.P., Jalal, K.F. & Boyd, J.A., 2008). Pariwisata berkelanjutan bukan bentuk diskrit atau khusus pariwisata. Sebaliknya, segala bentuk pariwisata harus berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan (UNEP-UNWTO, 2005).

Pariwisata berkelanjutan adalah tujuan yang ingin dicapai, bukan jenis produk pariwisata yang spesifik (Lu & Nepal, 2009). Oleh sebab itu, aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (equitable). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (viable). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (bearable). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (sustainable).

Penelitian ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengurai masalah yang dihadapi para stakeholder dalam mewujudkan sebuah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Merujuk pada UNEP-UNWTO (2005) dan dikuatkan oleh hasil penelitian Lu & Nepal (2009) yang menyatakan bahwa pendefinisian dan penggunaan indikator-indikator keberlanjutan merupakan komponen utama dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan, maka penelitian ini akan menggunakan isu dan indikator utama pengembangan pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi wisata (Baseline Indicators Of

Sustainable Tourism Development for Tourism Destination) oleh (UNWTO, 2004) sebagai pedoman. Di dalam tulisan ini, indikator-indikator pengembangan tersebut tidak mencakup seluruh isu, namun merupakan indikator dari 5 (lima) isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu: 1) kepuasan masyarakat lokal; 2) Dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal; 3) kepuasan wisatawan; 4) manfaat ekonomi pariwisata terhadap masyarakat; dan 5) pengelolaan limbah cair dan limbah padat.

Informasi yang diterima melalui pengukuran indikator-indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di dalam pengelolaan atau pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di kawasan Danau Toba, yang ditentukan berdasarkan diskusi-diskusi partisipatif dengan melibatkan stakeholder-stakholder terkait di kawasan tersebut. Dengan demikian dapat disusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait kebijakan antisipasi ancaman maupun perbaikan pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba.

METODE

Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Maret sampai dengan Agustus 2017. Lokasi penelitian adalah kawasan pariwisata di Kawasan Danau Toba yang diwakili oleh zona-zona peruntukan pariwisata yang telah diatur dalam Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya. Meliputi zona B3.1 (kawasan pariwisata berkelas/high-end) yang terdiri atas 2 kawasan, dan zona B3.2 (kawasan pariwisata massal yang menyediakan atraksi wisata, fasilitas wisata, serta fasilitas umum yang memadai dan digunakan secara bersama) yang terdiri dari 12 kawasan.

Pengumpulan data tidak dilaksanakan di seluruh zona peruntukan pariwisata tersebut. Sebagai perwakilan setiap kawasan, dipilih 1 (satu) desa atau huta. Maka dari 14 (empat belas) kawasan wisata diwakili oleh 15 (lima belas) Desa atau Huta. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa desa-desa tersebut dapat mewakili setiap kawasan wisata dan juga ke-7 Kabupaten sekitar Danau Toba.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu model penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Pendekatan penelitian

utama yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga data yang utama adalah bersifat kualitatif. Akan tetapi untuk melengkapi analisis data kualitatif, maka akan ditampilkan dan diperkuat pula dengan data-data yang bersifat kuantitatif, dengan pemahaman bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif.

Analisa kualitatif yang digunakan adalah deskriptif induktif, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah persentase dalam bentuk tabulasi. Jadi sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi induktif. Sedangkan untuk data kuantitatif (data-data yang dapat dikategorikan dalam bentuk angka-angka) analisis yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif berupa persentase yang ditampilkan dalam bentuk tabulasi frekuensi ataupun *cross tabulation* (tabulasi silang).

Data di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data wawancara (dengan kuisisioner/terstruktur dan panduan wawancara), observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan terhadap para subjek penelitian yaitu pihak pemerintah, para pelaku usaha kepariwisataan, para wisatawan (lokal dan mancanegara) dan masyarakat lokal di lokasi penelitian.

Wawancara dilakukan dengan dua cara: 1) menggunakan kuisisioner berdasarkan prosedur pengukuran indikator dasar Pariwisata berkelanjutan versi UNWTO, dimana skala pengukurannya diatur dengan nilai 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju dan 5 untuk sangat setuju; 2) wawancara dengan panduan wawancara (untuk seluruh subjek penelitian).

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan situasi pengelolaan kepariwisataan di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan di dalam teknik observasi ini disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Sedangkan teknik FGD dilakukan dengan mengumpulkan seluruh stakeholder kepariwisataan di kawasan danau toba di dalam sebuah grup diskusi, untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap data yang telah dikumpulkan di dalam analisis kondisi kepariwisataan di kawasan danau toba. Data sekunder di dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap dokumen atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penentuan informan atau responden penelitian dari unsur masyarakat lokal, wisatawan (lokal dan mancanegara) dan pelaku usaha pariwisata, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* (non-probability sampling). Metode tersebut dipilih dengan mempertimbangkan faktor ukuran populasi atau sampel yang tidak diketahui. Di dalam prakteknya, peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan ada di lokasi penelitian, dan bersedia dijadikan sebagai informan. Sedangkan penentuan informan dari unsur pemerintah, metode sampling yang digunakan adalah search sampling, dimana di dalam prakteknya peneliti akan mencari individu yang dari lembaga-lembaga Pemerintah terkait, yang memahami topik yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Merujuk hasil rekapitulasi jawaban masyarakat lokal terhadap dua pertanyaan terkait tingkat kepuasan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata yang berlangsung di daerah mereka, terlihat bahwa mayoritas informan telah merasa puas. Hal ini ditandai dengan positifnya jawaban mereka terhadap pernyataan: 1) bahwa kegiatan pariwisata berdampak baik bagi masyarakat masyarakat lokal; dan 2) bahwa masyarakat Danau Toba secara pribadi diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata.

Skor rata-rata jawaban atas pernyataan bahwa dampak pariwisata baik terhadap masyarakat lokal adalah 4,12 dari nilai maksimal 5, yang menempatkan komposisi jawaban berada di pernyataan setuju dan sangat setuju. Sedangkan untuk pernyataan bahwa informan secara pribadi diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata, skor berada pada nilai 3,98, yang menempatkan komposisi jawaban mayoritas pada pernyataan setuju.

Berdasarkan rekapitulasi survei tersebut juga diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa kegiatan pariwisata tidak mengganggu aktifitas mereka sehari-hari, dengan mayoritas menjawab tidak setuju terhadap pernyataan bahwa kegiatan pariwisata di daerah mereka telah mengganggu aktifitas mereka sehari-hari (skor 2,02). Di pihak lain, hasil survei terhadap para wisatawan juga mendukung hasil survei sebelumnya. Berdasarkan rekapitulasi jawaban para wisatawan mancanegara yang menjadi informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa mayoritas (57,9%) para wisatawan menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa mereka

merasa aman dan nyaman selama berada di lokasi wisata.

Jawaban atas survei yang dilakukan berbasis angket sebelumnya, juga sama dengan jawaban masyarakat lokal ketika peneliti menanyakan langsung pendapat mereka atas berlangsungnya kegiatan pariwisata di wilayah mereka. Masyarakat cenderung menggambarkan pariwisata sebagai suatu hal yang positif. Pariwisata adalah sumber pendapatan dan sebagai jalan bagi datangnya pembangunan ke wilayah mereka. Mereka mencontohkan bagaimana desa-desa mereka mendapatkan perhatian pemerintah (pusat maupun daerah) melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, layanan sosial lainnya), yang disebabkan oleh rencana atau telah berlangsungnya kegiatan wisata tersebut.

Satu hal yang menjadi masalah mengenai kepuasan masyarakat lokal terhadap kegiatan kepariwisataan di wilayah ini adalah, ungkapan kekecewaan mengenai ketidakterlibatan mereka pada rencana-rencana pengembangan wisata yang sekarang sedang isu besar di wilayah ini. Menurut mereka partisipasi masyarakat saat itu hanya sebatas pada partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti; memberi tempat tinggal, memberikan makanan dan minuman, menunjuk arah jalan, dan sebagainya. Tidak ada perencanaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurut mereka, selama ini setiap kebijakan hanya lahir dari pemerintah, sedangkan masyarakat hanya dilibatkan pada saat kebijakan itu sudah ada dalam berbagai diskusi dan sosialisasi.

Kesimpulan ini dikuatkan dengan pernyataan Sitorus.et.al (2016) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi di kawasan Danau Toba masih pada kategori tokenisme, yaitu sekedar justifikasi dan partisipasi sering menjadi semu. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pariwisata Danau Toba masih rendah dan belum ada mekanisme yang adil untuk menjaring partisipasi masyarakat. Partisipasi yang ada masih dalam taraf mengikutkan pejabat publik dalam berbagai forum pengambilan keputusan. Walaupun ada perwakilan masyarakat, namun belum secara representatif mewakili masyarakat.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan rekapitulasi hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat yang menjadi informan pada penelitian ini, diketahui bahwa mayoritas para informan berpendapat bahwa pariwisata masih berdampak baik terhadap ketiga aspek pembangunan berkelanjutan (sosial, budaya dan lingkungan) yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa para informan setuju bahwa kegiatan pariwisata telah: 1) menciptakan lapangan kerja; 2) mempekerjakan pemuda setempat; 3) membantu masyarakat mendapat pelayanan sosial; 4) membantu merangsang pertumbuhan budaya dan kerajinan lokal; 5) menggunakan sumberdaya lokal; dan 6) Uang yang dihabiskan oleh wisatawan sampai ke masyarakat lokal.

Data tersebut menggambarkan bahwa para informan tidak percaya bahwa kegiatan pariwisata telah berdampak terhadap: 1) kenaikan tingkat kejahatan; 2) membahayakan standar moral setempat; 3) mengganggu aktivitas masyarakat lokal; dan 4) membahayakan lingkungan/alam.

Satu-satunya masalah atau dampak tidak baik kegiatan pariwisata di kawasan Danau Toba berdasarkan survei ini adalah bahwa mayoritas informan percaya bahwa kegiatan pariwisata telah mengakibatkan meningkatnya harga barang. Bagi masyarakat, contoh konkrit yang dapat menggambarkan dampak tersebut adalah naiknya harga lahan dan perumahan. Hal ini banyak diutarakan masyarakat menggambarkan dampak kenaikan harga yang dirasakan mereka. Sebagai contoh adalah naiknya harga lahan di kawasan sekitar Tuktuk Siadong Samosir. Banyaknya usaha akomodasi yang dibangun oleh warga negara asing di wilayah tersebut, telah mengakibatkan naiknya harga lahan yang melonjak.

Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, para pengusaha asing tersebut berani "mematok" harga tinggi terhadap lahan-lahan yang mereka rencanakan menjadi tempat usaha mereka, dan hal tersebut berimbas terhadap harga lahan lainnya yang berada di sekitarnya. Dampak tersebut berakibat sulitnya masyarakat setempat untuk membangun rumah di wilayahnya sendiri, yang mengakibatkan mereka harus mencari lahan lain di luar wilayah tersebut. Selain itu, naiknya harga lahan juga berakibat naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai beban yang harus ditanggung masyarakat dengan naiknya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti) terhadap lahan-lahan yang dimiliki mereka.

Perbedaan kepentingan untuk tanah antara masyarakat lokal dengan pembangunan kepariwisataan ternyata juga dapat menyebabkan benturan kepentingan. Kasus pertanahan seringkali terjadi akibat adanya benturan-benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara para pihak yang berkepentingan. Secara horizontal, di Kawasan Danau Toba, konflik ini dapat terjadi antara individu (perorangan dengan perorangan), antara saudara, antara keturunan satu keluarga besar

(ahli waris), antara huta (kampung), dan antara margo. Demikian pula konflik antara pemegang hak ulayat dan perorangan yang memperoleh sertifikat tanah.

Kepuasan Wisatawan Terhadap Pariwisata di Kawasan Danau Toba. Survei terhadap para pengunjung mancanegara mengenai pengalaman mereka selama berkunjung ke kawasan Danau Toba, menjelaskan bahwa mereka cenderung puas selama berkunjung ke wilayah ini. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan mereka yang setuju terhadap pernyataan-pernyataan berikut: 1) Saya menikmati pengalaman saya di sini; 2) Keadaan jalan membuat perjalanan mudah; 3) kawasan wisata menyediakan beragam pengalaman yang baik; 4) Saya memiliki pengalaman bagus yang melibatkan budaya lokal; 5) Situs budaya terpelihara dengan baik; 6) Situs budaya mudah diakses; 7) Cindermata dan kerajinan tangan yang bagus tersedia; 8) Saya memiliki kesempatan yang baik untuk menikmati masakan lokal; 9) Kualitas makanan yang baik; 10) Kualitas akomodasi yang baik; 11) Tingkat pelayanan yang diberikan tinggi; 12) Staf layanan berkompeten dan membantu; 13) Keadaan lingkungan alami bagus; 14) Kawasan wisata memiliki pemandangan yang menarik dan bervariasi; 15) Mudah untuk sampai ke kawasan wisata untuk kunjungan saya; 16) Saya merasa aman dan nyaman selama kunjungan saya; 17) Saya merasa harga-harga sudah standard dan baik; 18) Saya akan merekomendasikan kawasan wisata ini kepada teman saya; dan 19) Saya akan mengunjungi kawasan wisata ini lagi.

Mendukung pernyataan setuju terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya, para pengunjung menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan : 1) Kota dan desa ramai (sesak); 2) Saya terganggu oleh kondisi daerah yang dibangun dengan tidak baik; 3) Saya terganggu oleh kebisingan.

Beberapa hal yang mungkin penting mendapat perhatian dari hasil survei ini adalah pernyataan para informan yang tidak tegas menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap tingkat kebersihan pantai di sekeliling danau toba dan mengenai sampah yang berserakan di tempat-tempat umum. Hal yang mendukung data tersebut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengunjung (baik domestik maupun mancanegara), dimana diketahui bahwa ada keengganan mereka untuk kontak langsung dengan perairan Danau Toba, dengan masih terlihatnya sampah dan tumbuhan eceng gondok di sekitar pantai, ditambah saluran buangan limbah air domestik

dan akomodasi yang terlihat langsung mengarah ke perairan danau toba.

Sebagai bukti ekstrim terkait hal tersebut adalah seperti yang terlihat di lokasi wisata Pantai Pasir Putih Parbaba Samosir yang merupakan lokasi wisata air, namun masih terlihat saluran air limbah domestik dan akomodasi yang mengalir ke arah pantai. Para informan menyampaikan keprihatinan mereka dengan kondisi tempat-tempat umum (pasar, dermaga, termasuk beberapa lokasi wisata) yang masih tergolong kurang bersih, dimana masih terlihat sampah berserakan yang tidak luput dari perhatian para pengunjung.

Masalah lain muncul ketika peneliti bertanya mengenai penerimaan masyarakat lokal atas kunjungan mereka ke wilayah ini. Memang, wisatawan mancanegara menganggap bahwa sikap masyarakat lokal masih tergolong sesuatu yang dapat diterima. Mereka masih menggambarkan masyarakat lokal sebagai sesuatu yang berbeda. seperti yang dicontohkan oleh ucapan dua orang warga Perancis yang kebetulan menumpang kendaraan peneliti menuju tempat mereka menginap di Tuk-tuk Siadong. *'The local is different, and we don't know how to explain it'*. Mereka percaya bahwa pada dasarnya masyarakat lokal ramah terhadap mereka, tapi dengan cara yang berbeda.

Demikian juga pernyataan dua orang warga Austria yang ditemui peneliti di Bakkara Humbang Hasundutan. *'we found the people is good, but there's something pushed us to keep distance with them, we don't know to say that'*. Mereka menganggap memang ada masalah dengan perilaku masyarakat lokal di dalam penerimaan mereka terhadap para pengunjung, walaupun sulit untuk diungkapkan, namun mereka merasa harus tetap menjaga jarak dengan masyarakat setempat.

Namun lain halnya dengan apa yang dirasakan oleh wisatawan domestik atau lokal. Secara ekstrim mereka menyatakan kekecewaan mereka terhadap perilaku masyarakat sekitar. Mereka menganggap bahwa masyarakat sekitar adalah masalah. Sering mereka menyatakan bahwa mereka sangat terganggu dengan sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal di dalam penyambutan mereka. Misalnya sikap kasar yang mereka terima ketika bernegosiasi mengenai harga barang atau jasa, paksaan untuk membeli barang dagangan masyarakat, layanan yang tidak seperti diharapkan, yang seluruhnya adalah ungkapan kekecewaan atas sikap ketidakramahan dan keengganan masyarakat lokal untuk melayani mereka dengan baik.

Ungkapan-ungkapan dari para wisatawan sebelumnya ternyata tidak sama dengan apa yang diungkapkan masyarakat ketika ditanya

mengenai penyambutan atau penerimaan mereka terhadap pengunjung yang datang ke wilayah mereka. Berdasarkan pengakuan masyarakat, mereka telah menampilkan sikap yang terbuka dan ramah kepada para wisatawan. Mereka juga mengaku bahwa telah berusaha melayani para pengunjung dengan sebaiknya. Pernyataan masyarakat lokal sebelumnya juga didukung oleh informasi yang diterima oleh peneliti dari unsur pemerintah dan swasta pengelola wisata yang menjadi informan pada penelitian ini.

Menurut mereka sebenarnya masyarakat lokal telah berusaha menunjukkan keramahan mereka terhadap para pengunjung, namun masih dengan standar yang mereka tahu, dan belum dapat "diapresiasi" atau diterima sebagai hal yang telah memuaskan para pengunjung di wilayah tersebut. Ada perbedaan sikap yang diharapkan dengan realita yang diterima para pengunjung dari masyarakat lokal, dan menjadi pembatas hubungan kedua belah pihak. Di satu pihak masyarakat merasa bahwa mereka memberikan yang terbaik bagi para pengunjung, namun di lain pihak para pengunjung merasa belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari masyarakat.

Perihal lain yang dikategorikan menjadi masalah terkait tingkat kepuasan pengunjung (wisatawan) yang berada di sekitar kawasan Danau Toba adalah ketersediaan makanan halal. Salah satu contoh yang menggambarkan permasalahan ini adalah catatan-catatan seorang informan dari wisatawan mancanegara yang berasal dari Uzbekistan yang notabene seorang muslim, yang merasa tidak diperlakukan dengan adil bila dibandingkan dengan pengunjung lain yang tidak memperlakukan kehalalan makanan. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan makanan yang pasti halal, ketika dia berada di restoran yang berada di penginapan atau hotel tempat dia menginap yang jelas-jelas mencantumkan makanan-makanan yang pasti tidak halal.

Permasalahan ini sering disampaikan para wisatawan domestik yang mayoritas beragama Islam, dan mengakibatkan mereka enggan untuk berlama-lama berada di kawasan ini. Menurut mereka, ada kesan bahwa kawasan wisata ini hanya khusus diperuntukkan bagi pengunjung yang non-muslim.

Pernyataan sebelumnya dapat dirasakan peneliti ketika berada di kawasan ini. Akan sangat jarang sekali tersedia makanan yang pasti halal di penginapan atau hotel yang menyediakan restoran bagi pengunjung yang menginap di tempat-tempat tersebut. Bila ingin

mendapat yang pasti halal, para pengunjung harus mencarinya di pusat-pusat keramaian (pusat kota atau pasar) yang telah banyak diisi oleh pedagang makanan halal.

Manfaat Ekonomi Kepariwisataannya Bagi Masyarakat Lokal di Kawasan Danau Toba.

Secara ekonomi, wisatawan adalah konsumen barang dan penerima manfaat layanan. Dari pengeluaran yang mereka lakukan, sebagian masuk langsung ke unit ekonomi dari industri pariwisata, bagian lainnya masuk ke anggaran daerah atau ke dalam anggaran negara, dan bagian ketiga masuk ke sektor ekonomi lainnya untuk pembayaran produk yang diserahkan dan layanan yang diberikan oleh sektor-sektor ini untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat mendukung pembangunan ekonomi baik masyarakat lokal maupun ekonomi suatu negara, melalui pendapatan dari pengunjung domestik maupun mancanegara (Bunghez, 2016).

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya (pada isu dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal), mayoritas para responden yang berasal dari masyarakat lokal Danau Toba setuju bahwa pariwisata berdampak terhadap pembangunan fasilitas sosial dan penyerapan tenaga kerja, yang merupakan dampak-dampak positif perekonomian sektor wisata terhadap masyarakat. Namun pandangan optimis tersebut tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran mereka tentang peluang masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, ada sikap pesimistis dari mereka mengenai kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di bidang kepariwisataan yang berlangsung di daerah mereka. Mereka mencontohkan rencana pengembangan yang sedang dilaksanakan pemerintah sekarang di danau toba. Mereka yakin bahwa bila nanti di kawasan ini banyak dibangun akomodasi-akomodasi yang berskala internasional, masyarakat lokal akan kalah bersaing dengan tenaga kerja pendatang yang datang ke wilayah ini. Mereka yakin bahwa para pengembang akan lebih percaya mempekerjakan pekerja impor daripada mereka.

Manfaat ekonomi langsung dari kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal (uang wisatawan sampai langsung kepada masyarakat), pada hasil survei yang telah disampaikan sebelumnya. Diketahui bahwa memang mayoritas masyarakat lokal yang menjadi responden di dalam penelitian ini menyatakan setuju (skor rata-rata 3.69) bahwa uang para wisatawan yang berkunjung ke

kawasan ini sampai kepada mereka. Hasil tersebut sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Sitorus.et.al (2016) yang menyatakan umumnya masyarakat setuju (70,41%), bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata akan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Danau Toba. Dua hasil survei ini menjadi kontra dengan data BPS yang menyampaikan kekhawatiran terhadap nilai rata-rata PDRB perkapita masyarakat di kawasan ini yang hanya Rp 8.534.492,00/tahun. Lalu berapa sebenarnya nilai uang (ekonomi) yang dapat diterima langsung oleh masyarakat lokal dari para wisatawan?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat lokal yang membuka usaha di sekitar lokasi-lokasi wisata yang tersebar di sekitar Danau Toba (Taman Wisata Iman Dairi, Salib kasih Tarutung, Tuktuk Siadong, Tomok dan Parapat), diketahui bahwa memang masyarakat lokal (terutama yang membuka usaha) di sekitar lokasi-lokasi wisata tersebut mendapatkan dampak ekonomi langsung (berupa uang) dengan adanya kunjungan para wisatawan ke lokasi-lokasi wisata tersebut.

Bukan hanya yang berdagang, juga masyarakat yang menawarkan jasa. Namun itu hanya ada pada masa-masa puncak wisata (bulan Desember, Januari dan Juli). Di Sembilan bulan selebihnya, masyarakat mengaku akan sangat sulit untuk membuka usahanya. Untuk itu, banyak dari mereka tidak membuka usaha atau menawarkan jasa mereka setiap hari dalam sepanjang tahun. Untuk bulan-bulan dengan kunjungan normal, mereka cenderung hanya membuka usaha di hari Sabtu dan Minggu (*weekend*), dan akan terbuka sepanjang hari untuk masa-masa puncak wisata.

Kondisi seperti yang telah disampaikan sebelumnya merupakan hal yang sering diumpamakan dengan istilah produk musiman, dimana sifat pariwisata tergantung dari musim. Ketika musim sepi kunjungan, wisatawan jarang berkunjung sehingga penghasilan penduduk berkurang. Produsen yang mengandalkan kehidupan penjualannya sepenuhnya di industri pariwisata akan mengalami masalah keuangan (Aryunda, 2011).

Produk musiman ini adalah salah satu dampak negatif pariwisata bila dipandang dari sisi perekonomian. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan bagi masyarakat lokal di Kawasan Danau Toba yang enggan menggantungkan nasibnya di sektor ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara terhadap masyarakat. Mereka menganggap lebih baik tetap dengan profesinya masing-masing

(mayoritas petani), daripada mengharapkan dari suatu yang tidak pasti. Begitu juga bagi para pemuda setempat yang lebih memilih merantau ke tempat lain daripada mengharapkan pekerjaan atau membuka usaha di sektor wisata yang berlangsung di wilayah mereka.

Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Yang Dihasilkan Kegiatan Pariwisata di Kawasan Danau Toba. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pendeskripsian kepuasan wisatawan terhadap kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba, yang menyatakan bahwa ada masalah di dalam pengelolaan limbah padat (sampah) maupun cair di kawasan ini, yang dicirikan dengan ketidaktegasan para wisatawan menanggapi pernyataan mengenai kondisi kebersihan pantai dan sampah yang berserakan di lokasi-lokasi wisata.

Data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa belum ada keseriusan para *stakeholder* terkait untuk menangani masalah ini. Misalkan saja di dalam pengukuran indikator utama isu ini yaitu mengenai persentase tempat usaha pariwisata (atau akomodasi) yang memiliki sistem pengolahan air limbah. Dari informasi yang diterima dari pihak Pemerintah Daerah yang khusus membidangi kepariwisataan dan lingkungan hidup, diterima informasi bahwa bisa dipastikan bahwa seluruh usaha akomodasi di wilayah ini belum ada yang memiliki sistem pengelolaan air limbah yang berstandar, kecuali mungkin usaha akomodasi (hotel) yang telah berstandar internasional seperti Simalem Resort yang ada di Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan Hotel Niagara yang berada di Parapat. Walaupun tidak dapat menunjukkan data kepada peneliti, para informan sangat yakin menyatakan kondisi tersebut.

Sebagai tindakan konfirmasi terhadap informasi yang diterima peneliti dari informan dari unsur pemerintah sebelumnya, di dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan pada usaha-usaha akomodasi yang ada di sekitar Danau Toba, memang sangat sulit mendapatkan usaha perhotelan yang telah memiliki sistem pengolahan limbah, seperti kolam-kolam penampungan dan pengendapan sebelum dilepas ke aliran air pembuangan. Umumnya usaha akomodasi yang ada di sekeliling Danau Toba (Parapat, Tomok, Tuk-tuk Siadong, Pangururan, Muara, Balige dan Tongging) membuang langsung air sisa aktivitasnya langsung ke saluran pembuangan yang bermuara ke Danau Toba.

Sejak tahun 1996 telah terbangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik yang berlokasi di Desa Sijambur, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir dan mulai beroperasi

sejak tahun 2000. IPAL ini dibangun dengan dana pinjaman dari Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Jepang sebesar 7,3 milyar rupiah. Pelayanan yang direncanakan adalah untuk mengelola air limbah domestik yang berasal dari masyarakat di Kota Parapat ibukota Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dan Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir melalui sistem perpipaan yang telah terpasang sepanjang ±15.000 m yang dilengkapi dengan 128 buah manhole dan 3 unit stasiun pompa untuk diolah di IPAL yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi.

IPAL yang dibangun menggunakan proses mikrobiologi di atas lahan seluas 2 Ha. Kapasitas pengolahan air limbah didesain sebesar 2.000 m³/hari atau setara dengan 3.000 sambungan rumah tangga. Terdapat beberapa unit pengolahan yang terdiri dari: Kolam Aerasi, Kolam Fakultatif dan Kolam Maturasi. Masing-masing kolam aerasi dan fakultatif dilengkapi dengan aerator, sedangkan kolam maturasi tidak dilengkapi dengan aerator. Hasil akhir proses pengolahan dialirkan ke Sungai Sera-Sera.

Permasalahannya adalah, dari kapasitas 3.000 sambungan yang dapat dilayani oleh sistem ini, baru hanya 300 sambungan (10%) yang memanfaatkannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terutama hotel-hotel dan restaurant untuk menyalurkan air limbahnya ke dalam sistem pengelolaan air limbah yang sudah disediakan dan lebih cenderung membuangnya secara langsung ke Danau Toba. Untuk tingkat akomodasi, berdasarkan informasi yang diterima ternyata hanya ada 3 (hotel) yang memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu Aek Sere Hotel, Hotel Darma Agung Beach, dan Hotel Inna Parapat.

Pengelolaan limbah padat (sampah) dilakukan dengan menyediakan sistem pengelolaan sampah khususnya di lokasi-lokasi umum seperti (pasar, tempat fasilitas transportasi dan khususnya daerah perkotaan). Pemerintah setempat menyediakan tempat-tempat penampungan sampah sementara, untuk lokasi penumpukan sampah dari aktifitas masyarakat. Namun hal tersebut hanya ada di pusat-pusat keramaian. Seperti yang terlihat di Muara, Balige, Parapat, Tomok, Tuktuk Siadong dan Pangururan. Sedangkan lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah peruntukan wisata lainnya yang tersebar di sekitar Danau Toba, contohnya Tongging, Bakkara, Meat, Sianjur Mula-mula dan lokasi lainnya, tidak terlihat adanya sistem pengelolaan sampah tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, umumnya mereka masih mengelola sampah secara konvensional yaitu dengan mengumpulkan dan membakarnya. Menurut mereka belum ada

program atau pembinaan dari pihak Pemerintah setempat mengenai pengelolaan sampah di lokasi-lokasi wisata tersebut.

Informasi tersebut ternyata diakui oleh Pemerintah daerah setempat. Pada saat peneliti melaksanakan pengumpulan data mengenai volume sampah dan sistem pengelolaan sampah di wilayah mereka, Pemerintah setempat mengakui bahwa mereka baru mengaplikasikan atau mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah di pusat-pusat berkumpulnya masyarakat (pusat-pusat perkotaan), dan itupun belum sepenuhnya mengikuti prinsip pengelolaan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan belum sepenuhnya terpadu.

Daftar Permasalahan dan Kebutuhan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Danau Toba. Berdasarkan deskripsi kondisi pengelolaan kepariwisataan di kawasan Danau Toba berdasarkan 5 (lima) isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan sebelumnya, dapat ditemukan 13 (tiga belas) masalah yang menjadi tantangan utama pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini.

Permasalahan tersebut, yaitu : 1) Keterlibatan masyarakat yang terbatas di dalam perencanaan pengembangan pariwisata; 2) Meningkatnya harga barang dan jasa akibat aktifitas kepariwisataan; 3) Ancaman konflik lahan; 4) Kondisi kebersihan lingkungan yang tidak baik; 5) Ketidaksiapan masyarakat lokal sebagai tuan rumah di sebuah destinasi wisata; 6) Terbatasnya akses wisatawan untuk menikmati budaya lokal; 7) Terbatasnya akses wisatawan muslim terhadap makanan halal; 8) Sikap pesimistis masyarakat lokal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang kepariwisataan; 9) Kalah bersaingnya produk usaha masyarakat lokal; 10) Pariwisata sebagai produk musiman; 11) Kecilnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; 12) Kecilnya dampak ekonomi langsung kepariwisataan bagi masyarakat lokal; dan 13) Belum adanya sistem pengelolaan limbah (cair dan padat) yang baik.

Merujuk pembedaan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh UNEP & UNWTO (2005). Masalah-masalah tersebut berkumpul di 5 (lima) bidang kebijakan, yaitu kebijakan mengenai: 1) bagaimana meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata; 2) bagaimana menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal; 3) bagaimana memenuhi kepuasan pengunjung; 4) bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan; dan

5) bagaimana menjamin lingkungan tetap lestari.

Pengelompokan penting dilakukan, untuk menentukan arahan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk itu, mengacu

pada panduan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh UNEP & UNWTO (2005). Maka arah kebijakan yang dapat direncanakan para pengampu kepentingan kepariwisataan di kawasan Danau Toba di tampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba

Kebutuhan Kebijakan	Arah kebijakan (UNEP & UNWTO, 2005)
Meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pasar 2. Menjaga kondisi perdagangan 3. Memelihara dan mengembangkan atraksi-atraksi wisata
Menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal dengan adanya kegiatan kepariwisataan di kawasan Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan kebocoran ekonomi 2. Mengutamakan produk lokal 3. Mempengaruhi tingkat pengeluaran (belanja) pengunjung
Memenuhi kepuasan pengunjung di Kawasan Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses yang luas bagi pengunjung 2. Menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung 3. Monitoring tingkat kepuasan wisatawan
Memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pemberdayaan masyarakat lokal 2. Memperbaiki partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan 3. Menjamin posisi masyarakat adat
Menjamin lingkungan di kawasan wisata Danau Toba tetap lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan 2. Mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan 3. Menekan jumlah limbah dan menyediakan "disposal area" yang baik 4. Mengawasi pembangunan fasilitas wisata yang baru

KESIMPULAN

Penyelesaian persoalan dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan, masih merupakan tugas besar bagi para stakeholder kepariwisataan di kawasan Kawasan Danau Toba. Hal ini dapat dilihat dari daftar permasalahan yang telah teridentifikasi pada penelitian ini, yang menggambarkan belum berjalannya sebuah manajemen pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di sebuah destinasi wisata.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten (Para Bupati) di sekitar Danau Toba agar berkoordinasi sesuai fungsi secara efisien, dengan membangun badan koordinasi lintas sektor yang terlibat di dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan, termasuk

keberlanjutan program pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba.

2. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten di sekitar danau toba melalui badan koordinasi lintas sektor, menyusun rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan tahun jamak (jangka pendek, menengah dan jangka panjang) di Kawasan Danau Toba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terpublikasinya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryunda. 2011. Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisat Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 22 No. 1, April 2011, hlm.1 – 16
- Baker, S. 2006. *Sustainable Development*. New York: Routledge 270 Madison Ave., NY 10016.
- Bunghez, C.L. 2016. The Importance of Tourism to a Destination's Economy. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economic*.
- Elliott, J. A. 2006. *An Introduction to Sustainable Development*. Oxon: Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, OX14 4RN.
- Hadi, S. P. 2007. *Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)*. Makalah Seminar Sosialisasi Sadar Wisata "Edukasi Sadar Wisata bagi Masyarakat di Semarang
- Kementerian Pariwisata. 2016. *Pembangunan destinasi pariwisata prioritas 2016 - 2019*. [Online]. Dari: <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-%20Deputi%20BPDIP.pdf>. [Diakses: 25 Mei 2017]
- Lu, J. & Nepal, S.K. 2009. Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(1), pp.5–16.
- Lumbanraja, V. 2012. Tourism Area Life Cycle in Lake Toba. *Indonesian Journal of Geography*, 44(2).
- Rogers, P.P., Jalal, K.F. & Boyd, J.A. 2008. *An Introduction To Sustainable Development*, Glen Educational Foundation, Inc.
- Sitorus, Henri. Nainggolan, Togar. Purba, Antonius Maju, dan Manurung, Sandrak. 2016. *Membangun Pariwisata Yang Bermartabat Dan Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba*. Medan: Bina Media Perintis.
- UNEP-UNWTO, 2005. *Making tourism more sustainable. A guide for policy makers*. [Online]. Dari: <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Making+Tourism+More+Sustainable:+A+Guide+for+Policy+Makers#0>. [Diakses: 15 Juli 2017].
- UNWTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations*.
- Weaver, D. 2006. *Sustainable Tourism: Theory and Practice*. First Publ., 30 Corporate Drive, Burlington, MA 01803: Elsevier Butterworth-Heinemann. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP.
- Zaei, M.E. & Zaei, M.E. 2013. *the Impacts of Tourism Industry on Host Community*. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, 1(2), pp.12–21.